

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisa mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengatur dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*

Adam Burgess, Alberto Alemanno dan Jens Zinn, *Routledge*

Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika,

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Atmosoedirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. 2017. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT Alumni.

Bryan A Garner. 2009. *Black Law Dictionary*, West Publising Co Thomson Reuter,

Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Douglas C. North. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: University Press, 1990.

Efendi, Lutfi, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Administasi Negara*, Malang, Mayumedia Publishing.

Erman Rajagukguk. *Hukum Investasi “ Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri”* Depok : Rajawali Press.

- Fernando M. Manullang. 2017. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hans Kelsen, 1949, *General Theory Of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Harvard University Press, Cambridge, Masschusetts.
- Hari Chand, 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur : Turbo
- Iqbal Hasan. 2021. *Hukum Investasi Internasional Teori dan Implementasi*, Bandung : Refika Aditama
- Iqbal Hasan, 2019. *Perjanjian Investasi Internasional “ Standar Perlakuan Adil dan Layak”*. Depok : Rajawali Press.
- Jan M. Otto dalam Soeroso. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimmy Asshidiqie. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Katerina Dementzo. 2018. *GDPR and the Concept of Risk : The Role of Risk, the Scope of Risk and the Technology Involve” Privacy and Identity Management*.
- Khudzaifah Dimyati. 2015. *Teoritisasi Hukum Studi tentang Penyelenggaraan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2015.
- L.J. van Apeldoorn. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, diterjemahkan Oetarid Sadino, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moh Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- M. Sornarajah, *The Internasional Law on Foreign Investment*, Second Edition Cambride; Cambrige University Press
- Mardalis, 2004, “*Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*”, Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Michael Huber dan Regine Paul. 2015, “ *Risk Base Regulation in Continental Europe*” *Explaining the Corporatist Turn to Risk in German Work Safety Policies*”, European Policy Analysis I.
- Milles dan Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Muhammad Erwin, 2021. *Filsafat Hukum Refeksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Depok : Rajawali Press
- N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M Hadjon, Surabaya: Yuridika.
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada,
- Philipus M Hadjon. 2005 Lihat dalam Abdul Latief, *Hukum dan Kebijaksanaan (Beleidregel) Pada Pemerintah Daerah*, UII Press : Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon et al.1998. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk.,2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,
- Redi, Ahmad. 2021. Omnibuslaw “ Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Hukum Perundang-Undangan Nasional. Depok : Rajawali Press.
- Riduan Syahrani. 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2018. Depok. Rajawali Press.
- SJ Fockema Andreae 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Tweede Druck, J.B Wolter*’ Uitgevers-maatshappij N.V Groningen,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali,

- Soerjono Soekanto. 1986. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: UI Press,
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Soetandijo Wignyoseobroto.1982. *“Hukum dan metode-metode kajiannya”*, makalah dalam Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Kerja Teknis Peneliti Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta : Departemen Kehakiman RI.
- Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta,
- Wicipto Setiadi. 2024. *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Rajawali Press.

TESIS

- Mubarok, Husni. 2024. *Pengaturan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Hukum Positif ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Amalia, Sri Wahyuni. 2023. *Pengaruh Asas Fiktif Positif Dalam Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS) RBA*. Magister Hukum Universitas Hasanuddin.
- Putra. M. Sadrark. 2024. *Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*. Magister Hukum, Universitas Jambi.

Sanjaya. 2023. *Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Tarihoran, Andris Junainten. 2024. *Kepastian Hukum Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Online Single Submission*, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

ARTIKEL / KARYA ILMIAH LAINNYA

Aurora Jillena Meliala, Adinda Putra Prakarsa, Jonathan Andre Woods, "Narrating The Effective Law For Foreign Direct Investment", Indonesian Journal of International Law Vol 21 No 5

Bahrur Rokhman, et al., 2024. "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)," Journal of Social and Economics Research, Vol. 6, No. 1

Black, Julia and Baldwin, Robert. 2012. *When Risk-Based Regulation Aims Low; Approaches and Challenges*. Regulation Governance, 6 (1). Pp. 2-22

C. Rumengan, 2022. "Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Di Indonesia", LEX CRIMEN Vol 10, no. 11,

Desi Arianing Arrum. 2019. *Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)*. Jurnal Jurist-Diction : Vol 2 No 5 September 2019.

Erni, Febri Jaya. 2022, *Efektifitas Perizinan Berbasis Resiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Jurnal Wajah Hukum Edisi Oktober 2022

Habibie Hendra Carlo, Dicky Herdyawan Bachrudin, Sonny Ferra Firdaus. 2021. "Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko", Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 6, no. 2.

- Hadi Arnowo. 2023. *Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan*, Jurnal Widya Bumi Vol 3 No 2 October 2023.
- Herlambang, Bonifacius. 2024. *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja : Hal-Hal yang perlu diperhatikan*, Jurnal Uner Law Review
- Imelda Magdalena Freedy dan Novani Karlina Saputri. 2018. *Refomasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator “ memulai usaha”*, Jakarta; Center For Indonesia Policy Studies (CIPS), Hlm 6
- Julia Black, 2005. *The Emergence of Risk-Based Regulation and The New Public Risk Management in The United Kingdom*. London School of Economics dan Political Science.
- Marbun, Eldbert Chistanto. 2022. *Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Online Single Submission (OSS)*. Dharmasiswa : Vol 1 Article 8.
- Mario Julyani, Aditya Yulu Sulistyawan. 2019. *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui kontruksi penalaran positivisme hukum*” Jurnal Crepido, Volume 01 Juli 2019.
- Mohammad Mova Ak’Afghani, Bisariyadi. 2021. *“Konsep Regulasi Berbasis Resiko Telaah Kritis Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja”*, Jurnal Konstitusi, Volume 18 Nomor 1
- N. N. Ain. 2021. *“Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi”*, Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, no. 01.
- Peter Mahmud Marzuki, 1997 *“ The Need for the Indonesia Economic Legal Framework”*Artikel, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX, Agustus.
- Sjachran Basah, 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya,

Sung-Hoon-Lim, *Foreign Investment Policy and Incentives*, Korea Trade Invesment Promotion Agency (KOTRA)

Syofyan Hadi, Tomy Michael. 2017. *Prinsip Keabsahan Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Jurnal Cita Hukum, Vol 5 No 2.

W. Fitri, & S. Sheerleen. 2021. “*Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 7, no. 2

Wicipto Setiadi, 2020, *Simplifikasi Regulasi Dengan Metode Pendekatan Omnibus Law* Jurnal Rechtsvinding, Vol.9 Nomor 1, April 2020, Hlm 42

INTERNET

Julia Black. Risk Based Regulation : *Choises, Practies and lesson Being Learnt*, “https://read.oecd-ilibrary.org/governance/risk-and-regulatory-policy/risk-based-regulation_9789264082939-11-en#page1,

OECD, “OECD Regulatory Policy Outlook 2021”, https://www.oecd.org/en/publications/2021/10/oecd-regulatory-policy-outlook-2021_c5274577.html diakses pada tanggal 18 Oktober 2024

Easybiz.id Perbedaan Sistem OSS versi 1.0 dan OSS versi 1.1 <https://www.easybiz.id/perbedaan-sistem-oss-versi-1-0-dan-oss-versi-1-1/>.

Agnes Theodora, Benediktus Krisna Yogatama . Lagu Lama Kendala Izin Berusaha. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/28/lagu-lama-kendala-izin-berusaha-tematis-perppu>

Azya Zs, “Omnibus law dan Rencana Penerapannya di Indonesia “, [http:// www-online-pajak.com/omnibus-law](http://www-online-pajak.com/omnibus-law)

Liedy Novanda, Umumkan Capaian Realisasi Semester I 2024 Bahlil Sebut Sektor UMKM Serap 4,6 Juta Tenaga Kerja. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/umumkan-capaian-realisis-semester-i-2024-bahlil-sebut-sektor-umkm-serap-4-6-juta-tenaga-kerja>

Lloyds Bank. Foreign Direct Injvestment (FDI) in Indonesia
<https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/indonesia/investment>

Mariska. Perusahaan sepatu dan alat olahraga asal Jerman, PUMA menggugat produsen obat nyamuk “Puma” Indonesia yang memiliki merek dengan nomor pendaftaran IDM000229381 atas nama Reno Mustopoh
<https://kontrakhukum.com/article/contoh-sengketa-merek>

Andi M Arief. Staedtler akan Bawa Kasus Pidana Lokal Ke Arbitrase Internasional.
<https://katadata.co.id/berita/industri/655efe3421ac3/staedtler-akan-bawa-kasus-pidana-lokal-ke-arbitrase-internasional>

Egi Adyatama. Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja.
<https://www.tempo.co/politik/pemerintah-terbitkan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-berikut-daftarnya-537676>

Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL), “Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) untuk siapa ?” <https://icel.or.id/id-id/search/v/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-untuk-siapa>

Rofiq Hidayat, “RUU Cipta Kerja Langkah Mundur Reformasi Regulasi”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pshk--ruu-cipta-kerja-langkah-mundur-reformasi-regulasi-lt5e467b351c48b>

Agil Oktaryal, “ Bahaya Omnibus Law Terhadap Demokrasi”,
<https://www.tempo.co/kolom/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokrasi-675438>,

CNBC Indonesia. 5 Alasan Pentingnya Omnibus Law Untuk Permudah Investasi.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191003184319-8-104295/5-alasan-pentingnya-omnibus-law-untuk-permudah-investasi>

Ira Guslina Sufa. Daftar 75 Undang-Undang yang terdampak Perppu Cipta Kerja.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/63b24216f1852/daftar-75-undang-undang-yang-terdampak-perppu-cipta-kerja>

Fitria Novia Heriani. Masih jadi Kendala di OSS RBA, BKPM diminta tuntaskan Mapping KBLI. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-jadi-kendala-di-oss-rba--bkpm-diminta-tuntaskan-mapping-kbli-lt625f76553da52>

Detik Finance. Urus Izin Via online di BKPM, Ini caranya
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2777795/urus-izin-via-online-i-di-bkpm-ini-caranya>

CNN Indonesia. 733.957 Nomor Induk Berusaha Terbit Hingga 31 Januari 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-induk-berusaha-terbit-hingga-31-januari-2022>

Fitria Novia Heriani, Sejak Januari PTSP Pusat Terbitkan Ribuan Izin.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-januari--ptsp-pusat-terbitkan-ribuan-izin-lt56401a19444c1>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko